

Millennium Challenge Account-Indonesia

Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

www.mca-indonesia.go.id

[f MCA.Indonesia.page](https://www.facebook.com/MCA.Indonesia.page)

[@MCA_Indonesia](https://twitter.com/MCA_Indonesia)

[@mca_indonesia](https://www.instagram.com/mca_indonesia)



Portofolio Proyek Kemakmuran Hijau



Perhutanan Sosial

Pengelolaan hutan selama lima dekade di Indonesia telah mengakibatkan tingkat penggundulan hutan yang tinggi dan konflik sosial antara komunitas, pemerintah, dan pelaku bisnis. Industri kehutanan yang ekstraktif dan pencurian kayu ilegal yang berlangsung di akhir 1990-an telah mengurangi luas hutan Indonesia dari 162 juta hektar menjadi 98 juta hektar.

Dari 70 ribu desa di Indonesia, 30 ribuan desa berada di dalam dan sekitar kawasan hutan, di mana 70% penduduknya menggantungkan hidupnya dari sumber daya hutan. Banyak komunitas lokal di lingkungan kawasan hutan tersebut yang tidak memiliki akses legal terhadap sumber daya hutan yang ada di sekitar mereka, dan hingga saat ini hanya terdapat kurang dari 1 juta hektar lahan di kawasan hutan yang secara legal telah dikelola oleh komunitas lokal dan diberikan ijin pengelolaan hutannya oleh negara.

Diperlukan komitmen kebijakan yang kuat, pendekatan yang komprehensif dan berkesinambungan untuk melestarikan hutan, membantu mengatasi degradasi lahan, mempertahankan kekayaan keanekaragaman hayati, dan menjawab persoalan kemiskinan di dalam dan sekitar hutan. Pengelolaan hutan berbasis komunitas lokal diyakini akan menjadi salah satu pilihan pengelolaan hutan yang lestari di Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Indonesia:

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah memulai berbagai program Perhutanan Sosial yang mengakomodasi serta mengakui keberadaan komunitas lokal dan keterlibatan komunitas dalam pengelolaan hutan;
- Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 pemerintah berkomitmen untuk mengalokasikan sedikitnya 12,7 juta hektar kawasan hutan untuk berbagai skema Perhutanan Sosial seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD) dan Hutan Rakyat (HR) serta Hutan Adat dan lainnya.
- Pemerintah Indonesia telah mengakui Hutan Adat berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2011, dan menjadi bagian dari skema Perhutanan Sosial.
- Berbagai kebijakan teknis telah dilansir KLHK untuk percepatan pelaksanaan Perhutanan Sosial, dan yang terbaru adalah Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan No 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, yang mengatur pengelolaan hutan oleh masyarakat dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Kemitraan dan Hutan Adat.

Pendekatan

Intervensi Proyek Kemakmuran Hijau bertujuan untuk mempercepat tercapainya target Perhutanan Sosial, dan mengembangkan model-model pengelolaan hutan berbasis komunitas yang berkelanjutan dan ekonomis – mengurangi aktivitas ekstraktif pada hutan. Lebih jauh lagi, MCA-Indonesia mendukung inisiatif penanaman pohon di lahan milik komunitas yang akan berkontribusi pada penyerapan karbon, dan mendorong model-model industri dan aktivitas bisnis yang berkelanjutan dan memberikan keuntungan pada pengelola hutan skala kecil.

MCA-Indonesia memberikan Hibah Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat (PSDABM) untuk:

- 1) Mendukung penerapan skema Perhutanan Sosial.
- 2) Mengembangkan model-model bisnis kehutanan berbasis komunitas.
- 3) Mengembangkan model-model industri berbasis industri kemasyarakatan.

Sebanyak 27 dari 53 penerima Hibah PSDABM bekerja dalam sektor perhutanan sosial. Mereka adalah:

Penerima Hibah	Proyek	Lokasi
Yayasan Dian Tama	Pengelolaan Sumberdaya Alam Hutan Rawa Gambut dan Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Meningkatkan Produktivitas Produk-Produk Unggulan Masyarakat	Kapuas Hulu
Perkumpulan SSS-Pundi Sumatra	Optimalisasi Pengelolaan Sumberdaya Alam Lestari (OPAL)	Pesisir Selatan, Muaro Jambi, Solok Selatan dan Kerinci
Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) PP Muhammadiyah	Program Restorasi Ekosistem Hutan Tropis melalui Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat dan Pengurangan Emisi Karbon di Desa Batu Rajang dan Siduong Indah di Kecamatan Segah, dan desa Long Keluh in Kecamatan Kelay, Kabupaten Berau.	Berau
Yayasan Satunama	Institutionalisasi Pengelolaan Hutan Desa (Penguatan Pelembagaan Pengelolaan Hutan Desa di Tingkat Lokal Melalui Realisasi UU Desa)	Merangin
Credit Union (CU) Keling Kumang	Proyek Penguatan Ekonomi Hijau Lokal Melalui Pemberdayaan Masyarakat Adat dan Pemulihan Lingkungan	Kapuas Hulu, Sintang
Yayasan Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN)	Mendukung Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat	Solok Selatan, Kerinci dan Pesisir Selatan
Aliansi Organisme Indonesia (AOI)	Pengembangan Hutan Desa Melalui Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Ekosistem Secara Berkelanjutan Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Rendah Emisi di Kabupaten Kapuas Hulu	Kapuas Hulu
Perkumpulan Gita Buana	Kreativitas Restorasi Berbasis Komunitas di Bentang Alam Ekosistem Berbak (BAEB) Kabupaten Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi.	Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur

Koperasi Jasa Menenun Mandiri (JMM)	Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Pelestarian Hutan untuk Mendukung Rehabilitasi Lahan, Peningkatan Kualitas dan Pemasaran Produk HHBK di Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat	Kapuas Hulu, Sintang
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH)	Pengembangan Model Pertanian Berkelanjutan Berbasis Masyarakat yang Didukung Pemanfaatan Energi Terbarukan Tenaga Air DAS Nokan Seroi di 2 Desa Penyangga Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat	Sintang
Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (Sumbar)	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui pengembangan ekonomi secara inklusif pada wilayah ekosistem DAS Indrapura, DAS Tarusan, DAS Silaut dan DAS Batanghari (sub DAS Batang Suliti, sub DAS Batang Bangko, sub DAS Batang Pulakek)	Solok Selatan, Pesisir Selatan
Komunitas Konservasi Indonesia WARSI (Jambi)	Memperkuat Praktek Pembangunan Hijau sebagai Upaya Peningkatan Fungsi Lingkungan dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal/Adat dalam Wilayah DAS Batanghari di Propinsi Jambi.	Kerinci, Merangin, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur
Yayasan WRI (Women Research Institute)	Pengelolaan Hutan Untuk Kesejahteraan Perempuan	Sintang, Solok Selatan, Pesisir Selatan
Perhimpunan Burung Indonesia/ Konsorsium Sumba Hijau	Menuju Kemakmuran Hijau Bentang Alam Sumba bagian Tengah: Meningkatkan Penghidupan Masyarakat dan Menjaga Kelestarian Alam	Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Timur
Perkumpulan Bantaya	Restorasi Ekosistem Hutan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat	Mamuju
PT Gaia Eko Daya Buana	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Melalui Rehabilitasi Ekosistem Hulu DAS di Gunung Rinjani dengan Agroforestri yang Berkelanjutan dan Rendah Emisi Karbon	Lombok Tengah
Sulawesi Community Foundation/ Konsorsium Berdaya Hijau	Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga melalui Perbaikan Tata Kelola Hutan Rakyat Berkelanjutan yang Berkontribusi pada Penyerapan Gas Rumah Kaca di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan	Luwu Timur
Himpunan Serikat Perempuan Indonesia (HAPSARI)	Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pembangunan Kebun Energi Rendah Karbon	Mamuju
Rimbawan Muda Indonesia (RMI)	Penguatan Inisiasi Ekowisata Berbasis Masyarakat yang adil dan berkelanjutan sebagai Sumber Penghasilan Alternatif Perempuan Menuju Kemandirian Ekonomi Rendah Karbon dan Perubahan Kualitas Hidup Perempuan Lombok Timur	Lombok Timur

KEMITRAAN	Membangun Wirausaha Perhutanan Sosial yang Produktif dan Berkelanjutan di NTB, NTT dan Sulawesi Tenggara	Kolaka, Sumba, Lombok
Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KPSHK)	Peningkatan Akses Kelola dan Fungsi Layanan Ekosistem Hutan Bagi Masyarakat Desa Hutan Secara Lestari di Lombok Timur, Lombok Utara dan Kolaka	Kolaka, Lombok Timur
Yayasan Operasi Wallacea Terpadu (OWT)	Membangun Model Pengelolaan Daerah Tangkapan Air (DTA) Secara Terpadu Melalui Penguatan Agroforestri Berbasis Kakao, Penguatan dan Pemanfaatan PLTMH dan Membangun Kepedulian Antar Desa dan Kecamatan Dalam Gerakan Perlindungan, Rehabilitasi dan Restorasi DTA	Luwu Utara
Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)	Prakarsa masyarakat adat memenuhi nilai-nilai kelestarian fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial dalam mengelola sumberdaya di bentang alam Tana Luwu.	Luwu Utara
Yayasan WWF Indonesia	Pemanfaatan Berkelanjutan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat - Pembangunan Ekonomi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Lanskap Gunung Rinjani Lombok	Lombok Utara dan Lombok Tengah
Perkumpulan Inisiatif	Sentra Industri Rotan Berkelanjutan	Mamuju
Lembaga Advokasi Buruh Migran Indonesia (ADBMI)	Perluasan Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Miskin yang menjadi Buruh Migran di 12 Desa Lingkar Taman Nasional Rinjani di Kabupaten Lombok Timur melalui Pengembangan Bisnis Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Sensitif Gender	Lombok Timur
Pusat Studi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSPSDM) Mataram	Peningkatan Kualitas Hidup Petani Lahan Kering, Desa Hutan Gunung Rinjani melalui Pertanian Berkelanjutan di Pulau Lombok	Lombok Utara, Lombok Timur, dan Lombok Tengah

Millennium Challenge Account-Indonesia

Mengentaskan Kemiskinan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Gedung MR21, Lantai 11.

Jl. Menteng Raya No. 21, Jakarta 10340

Tel. +6221 39831971 | Fax: +6221 39831970

 @MCA_Indonesia

 MCA.Indonesia.page

 @mca_indonesia

